

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sistem pemeriksaan hukum acara pidana di pengadilan Indonesia mewajibkan kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah oleh penuntut umum untuk diperiksa oleh hakim mengenai kasus yang dialami oleh terdakwa. Apabila terdakwa yang telah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya tidak hadir pada persidangan, maka pemanggilan terdakwa akan dilakukan secara paksa agar menghadiri persidangannya. Hal ini dilakukan bukan semata-mata hanya untuk penegakan supremasi hukum (Pasal 154 ayat (4) dan (6) KUHP) tetapi pemanggilan terhadap terdakwa dilakukan sebagai bentuk dari hak terdakwa dalam hal pelaksanaan hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya di muka pengadilan.

Sehubungan dengan pemanggilan terdakwa pada persidangan, pada fakta konkrit yang terjadi seringkali terdakwa yang telah dipanggil secara sah ternyata tidak menghadiri persidangan yang dimungkinkan terjadi karena terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya. Berkaitan dengan ketidakhadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah untuk menghadiri persidangan maka hakim yang memeriksa persidangan dapat mengambil sikap untuk melanjutkan sidang meski terdakwa tidak hadir atau persidangan In

Absentia. Persidangan In Absentia ini di dalam hukum Indonesia dapat diberlakukan pada kasus-kasus tindak pidana ekonomi (Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955) dan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999).

Adanya persidangan In Absentia merupakan langkah yang harus ditempuh karena selain bertujuan menunjukkan supremasi hukum agar para pelaku kejahatan tidak memperlmainkan hukum dan persidangan In Absentia ini juga diadakan demi menyelamatkan kekayaan Negara (dalam kasus korupsi). Pemeriksaan persidangan In Absentia ini akan tetap dijalankan meskipun hanya didasarkan keterangan dari alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat-surat maupun penilaian terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh jaksa yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak menghadiri persidangan. Hal ini tentu akan mengakibatkan hakim yang memeriksa persidangan hanya akan mendapatkan keterangan yang berat sebelah atau hanya keterangan dari Jaksa selaku penuntut umum. Pemberlakuan persidangan In Absentia ini bukan serta merta wujud dari kesewenang-wenangan hakim melainkan diberlakukan agar perkara yang masuk pada pengadilan negeri tidak terus menumpuk dan juga dikarenakan terdakwa sebagai subyek hukum yang mempunyai hak tidak menggunakan haknya untuk

melakukan pembelaan tetapi lebih memilih untuk menghindar dari pemeriksaan perkara dipersidangan.

Meskipun hanya mendengarkan keterangan yang berat sebelah, hakim sebagai pemeriksa persidangan In Absentia tidaklah serta merta mengikuti arahan dari keterangan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan penuntut umum. Hakim sebagai penegak hukum yang merdeka dan bebas dari pengaruh pihak lain akan mempertimbangkan pemberian putusan akhir secara obyektif (berdasarkan pada kondisi masalah itu sendiri, layak atau tidak layak suatu putusan dijatuhkan yang didasarkan pada pertimbangan hukumnya) dan apakah putusan akhir dapat memenuhi tujuan hukum (kepastian hukum, keadilan hukum, dan memberi kemanfaatan) serta tetap melindungi dan menjaga hak-hak dari terdakwa.

Setiap putusan akhir yang telah diputuskan oleh hakim yang berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana yang telah mendapat kekuatan hukum tetap akan dilaksanakan oleh jaksa (Pasal 270 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf (b)) terhadap terdakwa. Menjadi persoalan apabila jaksa yang berwenang melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa tetapi terdakwa tidak diketahui keberadaan atau alamatnya. Inilah yang akan menjadi persoalan hukum yang akan diteliti oleh penulis mengenai upaya apa yang akan dilakukan oleh jaksa selaku pelaksana putusan (eksekusi) yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa yang tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut :

“Apakah upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam melaksanakan putusan/eksekusi terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap jika terdakwa tidak diketahui keberadaannya?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam melaksanakan putusan yang telah beroleh kekuatan hukum tetap atau eksekusi terhadap terdakwa yang tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya.

D. Manfaat penelitian

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana mengenai pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi pada persidangan In Absentia

2. Praktis

- a) Bagi penegak hukum khususnya Jaksa agar dalam pelaksanaan putusan yang telah beroleh kekuatan hukum tetap atau eksekusi terhadap terdakwa yang tidak diketahui alamat atau keberadaannya tetap berjalan dan pelaksanaan eksekusi dapat tercapai

- b) Bagi perumus perundang-undangan agar membuat peraturan yang membantu jaksa dalam melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi terdakwa yang tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya
- c) Bagi masyarakat umum agar mengetahui dan ikut serta mengawasi pelaksanaan putusan yang telah beroleh kekuatan hukum tetap oleh jaksa dan ikut membantu upaya jaksa dalam mencari terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya atau melarikan diri

E. Keaslian penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI) OLEH JAKSA PADA PERSIDANGAN IN ABSENTIA ini merupakan hasil karya asli penulis, sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika ternyata ada penelitian lain yang melakukan penelitian hukum yang sama dengan penelitian hukum ini maka penelitian ini merupakan pelengkap yang dapat dijadikan literatur dari tulisan sebelum penelitian hukum ini.

F. Batasan konsep

1. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum banding dan kasasi¹

2. Jaksa

Jaksa berdasarkan Undang-Undang no. 16 Tahun 2004 merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²

3. Persidangan In Absentia

Persidangan In Absentia adalah persidangan tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan dikarenakan terdakwa yang telah dipanggil secara sah untuk menghadiri persidangan namun tidak hadir³

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif / data sekunder. Dalam penelitian Normatif penulis akan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif

¹ <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/09/29/%E2%80%9Cpelaksanaan-putusan-hakim-eksekusi>

² Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³ Dwiyanto Prihartono, 2008, Sidang Tanpa Terdakwa, UPKM/CD RS Betesdha Community development of Betesdha Hospital, Yogyakarta hlm.13

dengan cara melakukan sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi Diskripsi, Sistematisasi, Analisis, Interpretasi dan menilai hukum positif.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder/bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen ke-4
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
5. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1988
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan proses persidangan In Absentia, makalah, jurnal, Internet, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan In Absentia.

3. Metode pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

4. Metode analisis data

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

5. Sistematika penulisan

Penulisan hukum yang berjudul Perlindungan Konsumen Terkait Penipuan Dalam Transaksi Elektronik ini, terdiri dari tiga bab yaitu :

BAB I : BAB ini membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : BAB ini berisi tentang Pembahasan yang membahas tentang penulisan yang berjudul Pelaksanaan Putusan Pengadilan (eksekusi) Dalam Persidangan In Absentia.

BAB III : BAB ini akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik oleh penulis berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.